

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Obyek/Subyek Penelitian**

Kulon Progo adalah sebuah kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Ibukotanya adalah Wates. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul di timur, Samudra Hindia di selatan, Kabupaten Purworejo di barat, serta Kabupaten Magelang di utara. Nama Kulon Progo berarti sebelah barat Sungai Progo (kata kulon dalam Bahasa Jawa artinya barat). Kabupaten Kulon Progo terdiri atas 12 kecamatan, yang dibagi atas 87 desa dan 1 kelurahan, serta 930 Pedukuhan (sebelum otonomi daerah dinamakan Dusun). Pusat pemerintahan di Kecamatan Wates, yang berada sekitar 25 km sebelah barat daya dari pusat Ibukota Provinsi DIY, di jalur utama lintas selatan Pulau Jawa (Surabaya - Yogyakarta - Bandung).

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menjalankan pemerintahan dengan dibantu oleh seluruh SKPD yang ada pada wilayah Kulon Progo. Masing-masing SKPD bertugas untuk membantu pemerintahan dalam rangka mengelola keuangan daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji tingkat keterandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

Sampel dari penelitian ini adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) beserta staff atau pegawai yang membantu di seluruh SKPD Kabupaten Kulon Progo. Sampel penelitian ini

ditetapkan berdasarkan pertimbangan bahwa sampel tersebut merupakan pihak-pihak yang dapat memberikan informasi yang benar. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada PPK-SKPD beserta staff/pegawai yang membantunya. Kuesioner dibagikan ke SKPD di wilayah Kabupaten Kulon Progo yang terdiri dari:

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Pegawai Yang Mengisi Kuesioner**

No.	SKPD	Jumlah Pegawai
1.	Dinas Kesehatan	2
2.	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset	8
3.	Dinas Pendidikan	6
4.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Energi Sumber Daya Mineral	2
5.	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	4
6.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	4
7.	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah	2
8.	Dinas Pertanian dan Kehutanan	4
9.	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2
10.	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	2
11.	Dinas Pekerjaan Umum	5
12.	Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan	3
13.	Dinas Kebudayaan	5
14.	Badan Kepegawaian Daerah	7
15.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7
16.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3
17.	Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana	4
18.	Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu	2

Kuesioner yang disebarkan kepada responden yaitu 100, sedangkan kuesioner yang kembali sebanyak 74 dan yang dapat diolah sebanyak 72. Berikut tabel pengembalian kuesioner:

**Tabel 4.2**  
**Tingkat Pengembalian Kuesioner**

No.	Keterangan	Jumlah Kuesioner
1.	Kuesioner yang disebar	100
2.	Kuesioner yang kembali	74
3.	Kuesioner yang tidak kembali	26
4.	Kuesioner yang dapat diolah	72

(Sumber: Data Primer, diolah 2016)

### 1. Demografi Responden

Karakteristik responden yang diamati dalam penelitian ini meliputi tingkat jabatan dan pendidikan terakhir selama bekerja di SKPD. Hasil dari distribusi frekuensi dalam tabel berikut ini adalah:

#### a. Tingkat Jabatan Responden

Jumlah responden dengan tingkat jabatan yang didapat melalui penyebaran kuesioner dalam penelitian ini dapat dilihat secara lengkap pada tabel 4.3 berikut ini:

**Tabel 4.3**  
**Responden Berdasarkan Tingkat Jabatan**

Tingkat Jabatan	Frekuensi	Presentase
Kepala Sub Bagian Keuangan	18	25%
Staff Keuangan	54	75%
<b>Total</b>	<b>72</b>	<b>100%</b>

(Sumber Data Primer, diolah 2016)

Berdasarkan tabel 4.3 dapat disimpulkan bahwa dari 72 responden terdapat 18 orang yang menjabat sebagai kepala sub bagian keuangan atau

sebesar 25% dan responden yang menjabat sebagai staff keuangan sebanyak 54 responden atau sebesar 75%. Dilihat dari deskripsi jabatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada umumnya responden memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam pengelolaan keuangan. Diharapkan responden mengisi kuesioner tersebut dengan keadaan yang sebenarnya.

b. Pendidikan terakhir responden

Jumlah responden yang dapat diketahui berdasarkan tingkat pendidikan terakhir yang didapat melalui kuesioner dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut ini:

**Tabel 4.4**  
**Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir**

No.	Pendidikan	Frekuensi	Presentase
1.	S2	8	11,11%
2.	S1	36	50%
3.	D3	2	2,78%
4.	SMA	26	36,11%
<b>Total</b>		<b>72</b>	<b>100%</b>

(Sumber: Data Primer, diolah 2016)

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan bahwa responden yang berpendidikan terakhir SMA sebanyak 26 responden atau sekitar 36,11%, selanjutnya Diploma sebanyak 2 responden atau sekitar 2,78%, kemudian S1 sebanyak 36 responden atau sekitar 50%, dan pendidikan Pasca Sarjana sebanyak 8 responden atau sekitar 11,11%. Dilihat dari tingkat

pendidikan responden, mayoritas yang berada di bagian keuangan yaitu dari jenjang pendidikan S1. Artinya kemampuan yang dimiliki akan lebih menunjang untuk melakukannya dalam menjalankan tugas sebagai pengelola keuangan daerah.

c. Satuan kerja perangkat daerah

Jumlah responden yang dapat diketahui melalui kuesioner yang ada pada setiap SKPD dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut ini:

**Tabel 4.5**  
**Responden Berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)**

No	SKPD	Frekuensi	Presentase
1.	Dinas Kesehatan	2	2,78%
2.	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset	8	11,11%
3.	Dinas Pendidikan	6	8,33%
4.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Energi Sumber Daya Mineral	2	2,78%
5.	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	4	5,56%
6.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	4	5,56%
7.	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah	2	2,78%
8.	Dinas Pertanian dan Kehutanan	4	5,56%
9.	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2	2,78%
10.	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	2	2,78%
11.	Dinas Pekerjaan Umum	5	6,94%
12.	Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan	3	4,17%
13.	Dinas Kebudayaan	5	6,94%
14.	Badan Kepegawaian Daerah	7	9,72%
15.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7	9,72%
16.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3	4,17%
17.	Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana	4	5,56%
18.	Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu	2	2,78%
<b>Total</b>		<b>72</b>	<b>100%</b>

(Sumber: Data Primer, diolah 2016)

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa ada 72 responden yang mengisi kuesioner di SKPD Kabupaten Kulon Progo yang berada pada Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral, Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, dan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu memiliki 2 responden atau 2,78%. Pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pertanian dan Kehutanan, dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana memiliki 4 responden atau 5,56%. Selanjutnya Badan Kepegawaian Daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki 7 responden atau 9,72%. Kemudian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan memiliki 3 responden atau 4,17%. Sedangkan di DPPKAD memiliki 8 responden atau 11,11% dan Dinas Pendidikan memiliki 6 responden atau 8,33%.

## **B. Uji Kualitas Instrumen dan Data**

### **1. Uji Statistik Deskriptif**

Statistik Deskriptif pada penelitian ini menyajikan jumlah data, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (mean), dan standar deviation. Statistik deskriptif disajikan dalam tabel 4.6 berikut ini:

**Tabel 4.6**  
**Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SDM	72	38	55	43,89	3,300
PTI	72	26	40	32,19	3,422
SPIP	72	50	75	59,11	4,445
KTD	72	25	35	30,47	3,076
KTW	72	21	30	25,61	2,745
Valid N (listwise)	72				

(Sumber Data Primer, diolah 2016)

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa  $N = 72$ . Variabel Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y1) memiliki nilai maksimum 35 dan nilai minimum 25 dengan rata-rata 30,47. Variabel Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y2) memiliki nilai maksimum 30 dan nilai minimum 21 dengan rata-rata 25,61. Variabel Kualitas Sumber Daya Manusia (X1) memiliki nilai maksimum 55 dan nilai minimum 38 dengan rata-rata 43,89. Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2) memiliki nilai maksimum 40 dan nilai minimum 26 dengan rata-rata 32,19. Variabel Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X3) memiliki nilai maksimum 75 dan nilai minimum 50 dengan rata-rata 59,11.

## 2. Uji Kualitas Data

### a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur validnya suatu kuesioner. Kuesioner dapat dikatakan valid apabila pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan suatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas dapat dilakukan dengan menggunakan

nilai KMO MSA dengan ketentuan nilai KMO  $\geq 0,5$  dan nilai *loading factor*  $\geq 0,3$  (Sugiyono, 2004). Data uji validitas yang diperoleh dalam penelitian ini:

**Tabel 4.7**  
**Hasil Uji Validitas**

Variabel	Nilai KMO	Item	Nilai <i>loading factor</i>	Sig	Kriteria
Kualitas Sumber Daya Manusia (X1)	0,549 $\geq$ 0,5	SDM1	0,545	0,000	Valid
		SDM2	0,563	0,000	Valid
		SDM3	0,634	0,000	Valid
		SDM4	0,662	0,000	Valid
		SDM5	0,657	0,000	Valid
		SDM6	0,422	0,000	Valid
		SDM7	0,610	0,000	Valid
		SDM8	0,606	0,000	Valid
		SDM9	0,594	0,000	Valid
		SDM10	0,424	0,000	Valid
		SDM11	0,391	0,000	Valid
		SDM12	0,485	0,000	Valid
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2)	0,720 $\geq$ 0,5	PTI1	0,748	0,000	Valid
		PTI2	0,571	0,000	Valid
		PTI3	0,632	0,000	Valid
		PTI4	0,822	0,000	Valid
		PTI5	0,798	0,000	Valid
		PTI6	0,774	0,000	Valid

(Sumber: Data Primer, diolah 2016)



<b>Variabel</b>	<b>Nilai KMO</b>	<b>Item</b>	<b>Nilai loading factor</b>	<b>Sig</b>	<b>Kriteria</b>
	0,720 $\geq$ 0,5	PTI7	0,759	0,000	Valid
		PTI8	0,736	0,000	Valid
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X3)	0,665 $\geq$ 0,5	SPIP1	0,648	0,000	Valid
		SPIP2	0,578	0,000	Valid
		SPIP3	0,709	0,000	Valid
		SPIP4	0,700	0,000	Valid
		SPIP5	0,726	0,000	Valid
		SPIP6	0,656	0,000	Valid
		SPIP7	0,737	0,000	Valid
		SPIP8	0,884	0,000	Valid
		SPIP9	0,616	0,000	Valid
		SPIP10	0,553	0,000	Valid
		SPIP11	0,723	0,000	Valid
		SPIP12	0,789	0,000	Valid
		SPIP13	0,566	0,000	Valid
		SPIP14	0,542	0,000	Valid
		SPIP15	0,749	0,000	Valid

(Sumber: Data Primer, diolah 2016)

Variabel	Nilai KMO	Item	Nilai <i>loading factor</i>	Sig	Kriteria
Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y1)	0,751 $\geq$ 0,5	KTD1	0,642	0,000	Valid
		KTD2	0,777	0,000	Valid
		KTD3	0,710	0,000	Valid
		KTD4	0,794	0,000	Valid
		KTD5	0,759	0,000	Valid
		KTD6	0,700	0,000	Valid
		KTD7	0,893	0,000	Valid
Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y2)	0,733 $\geq$ 0,5	KTW1	0,428	0,000	Valid
		KTW2	0,929	0,000	Valid
		KTW3	0,847	0,000	Valid
		KTW4	0,751	0,000	Valid
		KTW5	0,709	0,000	Valid
		KTW6	0,724	0,000	Valid

(Sumber: Data Primer, diolah 2016)

Tabel 4.7 diatas, menunjukkan bahwa variabel kualitas sumber daya manusia memiliki nilai KMO sebesar  $0,549 \geq 0,5$  yang terdiri dari 12 pernyataan dan dinyatakan valid karena nilai *loading factor* (0,545; 0,563; 0,634; 0,662; 0,657; 0,422; 0,610; 0,606; 0,594; 0,424; 0,391; 0,485). Variabel pemanfaatan teknologi informasi memiliki nilai KMO sebesar  $0,720 \geq 0,5$  yang terdiri dari 8 pernyataan dan dinyatakan valid karena nilai *loading factor* (0,748; 0,571, 0,632; 0,822, 0,798; 0,774; 0,759; 0,736).

Sedangkan variabel sistem pengendalian internal pemerintah memiliki nilai KMO sebesar  $0,665 \geq 0,5$  yang terdiri dari 15 pernyataan dan dinyatakan valid karena nilai *loading factor* (0,648; 0,578; 0,709; 0,700; 0,726; 0,656; 0,737; 0,884; 0,616; 0,553; 0,723; 0,789; 0,566; 0,542; 0,749). Selanjutnya variabel keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah memiliki nilai KMO sebesar  $0,751 \geq 0,5$  yang terdiri dari 7 pernyataan dan dinyatakan valid karena nilai *loading factor* (0,642; 0,777; 0,710; 0,794; 0,759; 0,700; 0,893). Dan variabel ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah memiliki nilai KMO sebesar  $0,733 \geq 0,5$  yang terdiri dari 6 pernyataan dan dinyatakan valid karena nilai *loading factor* (0,428; 0,929; 0,847; 0,751; 0,709; 0,724). Instrumen dapat dinyatakan valid apabila hasil perhitungan nilai *loading factor* 0,3 atau lebih (Sugiyono, 2004). Jadi dapat disimpulkan bahwa setiap butir pernyataan adalah valid.

#### **b. Uji Reliabilitas**

Penelitian ini menggunakan pengukuran reliabilitas yang dilakukan dengan bantuan SPSS yang memberikan fasilitas mengukur reliabilitas dengan Uji Statistik Cronbach Alpha ( $\alpha$ ). Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan Cronbach Alpha  $\geq 0,50$ .

**Tabel 4.8**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

<b>Variabel</b>	<i>Cronbach Alpha</i>	<b>Kriteria</b>
Kualitas Sumber Daya Manusia (X1)	0,520	Reliabel
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2)	0,708	Reliabel
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X3)	0,647	Reliabel
Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y1)	0,938	Reliabel
Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y2)	0,870	Reliabel

(Sumber: Data Primer, diolah 2016)

Tabel 4.8 diatas menunjukkan bahwa nilai Cronbach Alpha dari masing-masing konstruk lebih besar dari 0,50 yang berarti bahwa kuesioner yang merupakan indikator-indikator dari variabel atau konstruk tersebut reliabel.

### 3. Uji Asumsi Klasik

#### a. Uji Normalitas

Uji Normalitas (kolmogorov smirnov t test) bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel residual memiliki distribusi normal, seperti diketahui bahwa uji t dan uji f mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal.

Hasil uji normalitas sebagai berikut:

**Tabel 4.9**  
**Hasil Uji Normalitas**

One Kolmogorov Smirnov	Nilai Sig	Keterangan
Unstandardized Residual	0,124	Data Normal

(Sumber: Data Primer, diolah 2016)

Uji Normalitas pada penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Data dapat dikatakan berdistribusi normal jika memiliki signifikan  $\geq 0,50$ . Hasil penelitian ini menunjukkan nilai signifikan sebesar  $0,124 \geq 0,50$ , maka data berdistribusi normal sehingga dapat diuji dengan analisis regresi.

**b. Uji Multikolinieritas**

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Dilihat dari nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Jika nilai tolerance  $\leq 0,10$  atau nilai  $F \geq 10$  berarti menunjukkan adanya multikolinieritas (Nazaruddin dkk, 2015).

**Tabel 4.10**  
**Hasil Uji Multikolinieritas**

<b>Persamaan 1 (Keterandalan)</b>			
<b>Variabel</b>	<i>Collinearity statistics</i>		<b>Keterangan</b>
	<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>	
Kualitas Sumber Daya Manusia	0,746	1,340	Tidak terjadi multikolinieritas
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,826	1,210	Tidak terjadi multikolinieritas
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	0,740	1,351	Tidak terjadi multikolinieritas
<b>Persamaan 2 (Ketepatan Waktu)</b>			
<b>Variabel</b>	<i>Collinearity statistics</i>		<b>Keterangan</b>
	<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>	
Kualitas Sumber Daya Manusia	0,746	1,340	Tidak terjadi multikolinieritas
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,826	1,210	Tidak terjadi multikolinieritas
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	0,740	1,351	Tidak terjadi multikolinieritas

(Sumber: Data Primer, diolah 2016)

Tabel 4.10 diatas menunjukkan bahwa semua variabel independen dalam penelitian ini memiliki nilai tolerance lebih dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas dalam kedua persamaan regresi dari penelitian ini.

### c. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pemangatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tidak memiliki perubahan (tetap), maka disebut

homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas (Ghozali, 2011).

Hasil Uji Heteroskedastisitas dalam penelitian ini sebagai berikut:

**Tabel 4.11**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

<b>Persamaan 1 (Keterandalan)</b>			
<b>Variabel</b>	<b>Heteroskedastisitas</b>		<b>Keterangan</b>
	<b><math>t_{hitung}</math></b>	<b>Sig</b>	
Kualitas Sumber Daya Manusia	-1,607	0,113	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Pemanfaatan Teknologi Informasi	-0,658	0,513	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	-1,252	0,215	Tidak terjadi heteroskedastisitas
<b>Persamaan 2 (Ketepatan Waktu)</b>			
<b>Variabel</b>	<b>Heteroskedastisitas</b>		<b>Keterangan</b>
	<b><math>t_{hitung}</math></b>	<b>Sig</b>	
Kualitas Sumber Daya Manusia	0,749	0,457	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,059	0,953	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	-1,718	0,090	Tidak terjadi heteroskedastisitas

(Sumber: Data Primer, diolah 2016)

Tabel 4.11 diatas menunjukkan bahwa hasil pengujian heteroskedastisitas dengan uji glejser tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada kedua persamaan regresi, karena taraf signifikansi  $t_{hitung}$  lebih besar dari 0,05. Maka dari ketiga variabel tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas sehingga dapat diuji dengan analisis regresi.

### C. Hasil Penelitian (Uji Hipotesis)

Uji Hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda yang digunakan untuk mengetahui pengaruh 2 variabel independen atau lebih terhadap variabel dependen. Hasil perhitungan regresi dapat dilihat pada tabel 4.12:

**Tabel 4.12**  
**Hasil Perhitungan Regresi Berganda**  
**Persamaan 1 (Keterandalan)**

Variabel	Koefisien Regresi	T	Sig	Keterangan
Konstanta	4,570	0,981	0,330	
SDM	0,034	0,329	0,743	Tidak Signifikan
PTI	0,387	4,114	0,000	Signifikan
SPIP	0,202	2,641	0,010	Signifikan

(Sumber: Data Primer, diolah 2016)

**Persamaan 2 (Ketepatan Waktu)**

Variabel	Koefisien Regresi	T	Sig	Keterangan
Konstanta	3,279	0,857	0,394	
SDM	-0,013	-0,156	0,877	Tidak Signifikan
PTI	0,480	6,207	0,000	Signifikan
SPIP	0,126	2,008	0,049	Signifikan

(Sumber: Data Primer, diolah 2016)

Berdasarkan tabel 4.12 rumus regresi pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y_1 = \alpha + 0,034 \text{ SDM} + 0,378 \text{ PTI} + 0,202 \text{ SPIP} + \varepsilon$$

$$Y_2 = \alpha - 0,013 \text{ SDM} + 0,480 \text{ PTI} + 0,126 \text{ SPIP} + \varepsilon$$

Model tersebut berarti bahwa:

- a) Variabel kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
- b) Variabel kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah.



- c) Variabel pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
- d) Variabel pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah.
- e) Variabel sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
- f) Variabel sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah.

### 1. Uji Parsial (Uji T)

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen.

Hasil uji t pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.13**  
**Hasil Uji Hipotesis**

#### **Persamaan 1: Keterandalan**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	4,570	4,658		,981	,330
SDM	,034	,103	,036	,329	,743
PTI	,387	,094	,431	4,114	,000
SPIP	,202	,077	,292	2,641	,010

(Sumber: Data Primer, diolah 2016)

#### **Persamaan 2: Ketepatan Waktu**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	3,279	3,825		,857	,394
SDM	-,013	,084	-,016	-,156	,877
PTI	,480	,077	,598	6,207	,000
SPIP	,126	,063	,204	2,008	,049

(Sumber: Data Primer, diolah 2016)

a. Uji Hipotesis Pertama (H1)

Hasil dari pengujian hipotesis yang didapat yaitu nilai  $t_{hitung}$  pada variabel kualitas sumber daya manusia (X1) adalah sebesar 0,329 dengan nilai signifikan  $0,743 \geq 0,05$  maka hipotesis yang menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah (Y1). Maka hipotesis pertama ditolak. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zuliarti (2012) yang mengemukakan bahwa kapasitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Maka dari itu diperlukan adanya pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan tugasnya sebagai pegawai penatausahaan keuangan agar dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang baik sehingga dapat menyajikan pelaporan keuangan yang andal.

b. Uji Hipotesis Kedua (H2)

Hasil dari pengujian hipotesis yang didapat yaitu nilai  $t_{hitung}$  pada variabel Kualitas Sumber Daya Manusia (X1) adalah sebesar -0,156

dengan nilai signifikan  $0,877 \geq 0,05$  maka hipotesis yang menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah (Y2).

Hal ini menunjukkan bahwa ternyata kualitas sumber daya manusia tidak menentukan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah, dikarenakan kemampuan sumber daya manusia yang rendah dalam menjalankan tugasnya yang tidak memiliki latar pendidikan akuntansi. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Sibagariang (2013) yang menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kinerja SKPD.

c. Uji Hipotesis Ketiga (H3)

Hasil dari pengujian hipotesis yang didapat yaitu nilai thitung pada variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2) adalah sebesar 4,114 dengan nilai signifikan  $0,000 \leq 0,05$  maka hipotesis yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah (Y1).

Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi menentukan keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Artinya Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah memanfaatkan secara baik teknologi informasi yang telah disediakan sehingga dapat menyajikan pelaporan keuangan dengan tingkat keandalan secara efektif. Adanya optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dapat membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja

pemerintahan akan bekerja secara terpadu. Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Winidyaningrum dan Rahmawati (2010), Rosalin dan Kawedar (2011), serta Hullah dan Budiarmo (2012).

d. Hipotesis Keempat (H4)

Hasil dari pengujian hipotesis yang didapat yaitu nilai thitung pada variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2) adalah sebesar 6,207 dengan nilai signifikan  $0,000 \leq 0,05$  maka hipotesis yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah (Y2).

Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi ternyata menentukan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah. Adanya teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas dapat membantu pemerintah dalam penyimpanan data keuangan dan juga dapat menggunakan teknologi komunikasi dalam penyebarannya sehingga tidak adanya keterlambatan dalam penyajiannya. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Indriasari dan Nahartyo (2008), Winidyaningrum dan Rahmawati (2010), serta Rosalin dan Kawedar (2011).

e. Uji Hipotesis Kelima (H5)

Hasil dari pengujian hipotesis yang didapat yaitu nilai thitung pada variabel Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X3) adalah sebesar 2,641 dengan nilai signifikan  $0,010 \leq 0,05$  maka hipotesis yang

menyatakan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah (Y1).

Hal ini menunjukkan bahwa ternyata sistem pengendalian pemerintah menentukan keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Artinya Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah menjalankan kegiatan pengendaliannya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Indriasari dan Nahartyo (2008), Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) dan Rosalin dan Kawedar (2011).

f. Uji Hipotesis Keenam (H6)

Hasil dari pengujian hipotesis yang didapat yaitu nilai thitung pada variabel Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X3) adalah sebesar 2,008 dengan nilai signifikan  $0,049 \leq 0,05$  maka hipotesis yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah (Y2).

Hal ini menunjukkan bahwa ternyata sistem pengendalian internal pemerintah menentukan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah. Artinya Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menjalankan sistemnya melalui DPPKAD telah berhasil mengintegrasikan seluruh komponen organisasi secara berkelanjutan

sehingga dapat mencapai ketepatan waktu dalam memberikan informasi. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mirnayanti (2013).

### 3. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Pengujian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen pada penelitian ini dengan melihat dari besarnya nilai koefisien determinasi *adjusted* ( $R^2$ ). Hasil Uji Adjusted R Square dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.14**  
**Hasil Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

#### **Persamaan 1: Keterandalan**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.620 <sup>a</sup>	.384	.357	2.467

(Sumber: Data Primer, diolah 2016)

#### **Persamaan 2: Ketepatan Waktu**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.692 <sup>a</sup>	.478	.455	2.026

(Sumber: Data Primer, diolah 2016)

Dari tabel diatas dapat diketahui besarnya Adjusted R Square untuk persamaan pertama sebesar 0,357. Hal ini menunjukkan bahwa hanya 35,7% variasi Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y1) yang dapat dijelaskan oleh variabel independen yang mempengaruhi yaitu Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sedangkan sisanya sebesar

64,3% dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Pada persamaan kedua besarnya Adjusted R Square yaitu 0,455 yang menunjukkan hanya 45,5% variasi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y2) yang dapat dijelaskan oleh variabel independen yang mempengaruhi yaitu Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sedangkan sisanya sebesar 54,5% dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

#### **D. Pembahasan (Interpretasi)**

##### **1. Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Hasil uji hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan hipotesis pertama yaitu kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan maka dinyatakan hipotesis pertama **ditolak**. Peneliti mengetahui berdasarkan pernyataan kuesioner yang diberikan oleh peneliti kepada responden dengan indikator pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing individu. Hal ini menunjukkan bahwa di lingkungan pemerintahan yang berada pada penatausahaan keuangan tidak didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi serta kurangnya pelatihan dalam menjamin fungsi akuntansi yang berjalan dengan baik pada lingkungan pemerintahan. Kelemahan

yang ada diimbangi dengan mengikut sertakan pegawai dalam pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah seperti pelatihan perpajakan, pelatihan bendahara, dan pelatihan penatausahaan pengelolaan keuangan daerah.

Hasil penelitian ini mendukung secara empirik studi yang dilakukan oleh Zuliarti (2012) yang menghasilkan kapasitas SDM tidak berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan.

## **2. Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Hasil uji hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan hipotesis kedua yaitu kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan maka dinyatakan hipotesis kedua **ditolak**. Peneliti mengetahui berdasarkan pernyataan kuesioner yang diberikan oleh peneliti kepada responden dengan indikator pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing individu. Hal tersebut memiliki ketidaksignifikansian yang disebabkan oleh keadaan sumber daya manusia yang berada di sub bagian akuntansi atau staff keuangan tidak memiliki kualitas dan kuantitas yang cukup baik. Dari sisi kuantitas, masih sangat sedikit jumlah akuntan atau pegawai yang berpendidikan tinggi akuntansi, sementara peraturan perundang-undangan telah mewajibkan setiap satuan kerja untuk menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan, maka pegawai yang ada yang diberdayakan (Zuliarti, 2012).



Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sibagariang (2013) yang menyimpulkan bahwa kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kinerja SKPD, serta didukung oleh penelitian Ponamon (2012) yang menyatakan bahwa sumber daya manusia berpengaruh negatif terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

### **3. Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Hasil uji hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan hipotesis ketiga yaitu pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan maka dinyatakan hipotesis ketiga **diterima**. Peneliti mengetahui berdasarkan pernyataan kuesioner yang diberikan oleh peneliti kepada responden berdasarkan indikator perangkat pendukung, pengelolaan data keuangan, dan perawatan perangkat. Hal ini menunjukkan bahwa dilingkungan pemerintahan telah memiliki perangkat yang cukup mendukung dalam menjalankan tugasnya serta menggunakan teknologi informasi sesuai dengan fungsinya dan diharapkan aparatur dapat memanfaatkan serta mengembangkan teknologi sehingga akan menghasilkan informasi yang andal dan valid. Maka dari itu, pemerintah dapat meningkatkan pengelolaan keuangan yang akan dikonsumsi oleh publik dengan adanya alat pendukung teknologi informasi.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Indriasari dan Nahartyo (2008), Winidyaningrum dan Rahmawati (2010), Adriani (2010), serta Rosalin dan Kawedar (2011) membuktikan bahwa teknologi informasi berpengaruh positif terhadap keandalan laporan keuangan pemda.

#### **4. Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Hasil uji hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan hipotesis keempat pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan maka dinyatakan hipotesis keempat **diterima**. Peneliti mengetahui berdasarkan pernyataan kuesioner yang diberikan oleh peneliti kepada responden berdasarkan indikator perangkat pendukung, pengelolaan data keuangan, dan perawatan perangkat. Hal ini menunjukkan bahwa dilingkungan pemerintahan yang berada pada penatausahaan keuangan telah mampu menyajikan laporan keuangan dengan menggunakan teknologi informasi yang telah disediakan sehingga dapat mengefisienkan waktu dalam menyusun atau proses pembuatannya. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi informasi telah dilaksanakan dengan baik oleh pihak yang bersangkutan dalam penyajian laporan keuangan dan pada akhirnya akan menyajikan laporan keuangan tepat pada waktunya.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Desmiyawati (2014) yang menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

#### **5. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Hasil uji hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan hipotesis kelima yaitu sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan maka dinyatakan hipotesis kelima **diterima**. Peneliti mengetahui berdasarkan pernyataan kuesioner yang diberikan oleh peneliti kepada responden dengan indikator lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Menurut Permendagri No. 60 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pengendalian intern merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan. Ada tiga fungsi yang terlihat dari definisi tersebut yaitu: (a) keterandalan pelaporan keuangan, (b) efisiensi dan efektivitas operasi, dan (c) kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Indriasari dan Nahartyo (2008), Rosalin dan Kawedar (2011) menunjukkan bahwa

pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap keterandalan laporan keuangan pemerintah daerah.

#### **6. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Hasil uji hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan hipotesis keenam sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan maka dinyatakan hipotesis keenam **diterima**. Peneliti mengetahui berdasarkan pernyataan kuesioner yang diberikan oleh peneliti kepada responden dengan indikator lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Sistem pengendalian internal pemerintah dapat mengurangi kekeliruan sehingga pelaporan keuangan yang dihasilkan atau disajikan dengan valid dan benar. Keterlambatan penyajian laporan keuangan berarti bahwa laporan keuangan belum atau tidak memenuhi nilai informasi yang disyaratkan, yaitu ketepatan waktu. Ketidaktepatan penyajian laporan keuangan juga berkaitan dengan kurang ditaatinya pengendalian internal yang diterapkan. Penelitian Mirnayanti (2013) dan Desmiyawati (2014) menunjukkan pengendalian internal berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah.